

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI

ADMINISTRASI PUBLIK

Skripsi, 14 Agustus 2024

MUHAMMAD FAHMI ASHIDDIQI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUPAHAN OLEH DINAS TENAGA
KERJA (DISNAKER) KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan pengupahan yang sesuai dengan upah minimum pokok di Kota Tasikmalaya. Permasalahan yang menjadi temuan adalah kurangnya informasi mengenai jumlah Upah Minimum Kota yang harus diberikan perusahaan kepada pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kota lalu peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya dalam merealisasikan Undang-Undang N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekskriptif. Data yang diperoleh dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam analisis adalah Teori Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu: a) Standar Kebijakan; b) Sumber daya; c) Hubungan antar Organisasi; d) Karakteristik agen pelaksana; e) Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik; f) disposisi pelaksana. Hasil kajian menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan belum merasakan dampak yang signifikan dari regulasi yang ada. Kemudian sumber daya manusia, anggaran dan Material di Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya belum berjalan maksimal. Hubungan antar organisasi telah berjalan cukup baik. Karakteristik pelaksana yang belum terimplementasi dengan baik khususnya kepada serikat buruh. Disposisi implementor sudah melakukan program-program yang telah merujuk kepada kebutuhan pengupahan di kota tasik, namun perlu adanya langkah-langkah realistis dan preventif yang dilakukan dalam upaya sosialisasi pengupahan dan ketenagakerjaan. Begitu juga kondisi ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung pelaksanaan pengupahan dimana wilayah tasik sendiri memiliki sdm dan sda yang mendukung.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Upah Minimum Kota, Kota Tasikmalaya
Referensi : 34 Referensi (2003-2024), 6 Buku, 16 Jurnal, Dokumen 4 dan 8
Sumber Internet

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES PUBLIC

ADMINISTRATION STUDY PROGRAM

Thesis, August 14, 2024

MUHAMMAD FAHMI ASHIDDIQI

IMPLEMENTATION OF WAGE POLICY BY THE TASIKMALAYA CITY
MANPOWER OFFICE (DISNAKER)

ABSTRACT

This research is motivated by the lack of optimal implementation of wages in accordance with the basic minimum wage in Tasikmalaya City. The problem that was found was the lack of information about the amount of the City Minimum Wage that the company must provide to employees. The purpose of this study is to find out how the implementation of the Governor of West Java Regulation regarding the determination of the provincial minimum wage and the city minimum wage, and then the researcher also wants to know the extent of the policies of the Tasikmalaya City Government, especially the Tasikmalaya City Manpower Office, in realizing Law NO 13 of 2003 concerning Manpower. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data obtained was carried out by observation, interviews, and documentation. The theory used in the analysis is the Van Metter and Van Horn Theory which consists of several indicators, namely: a) Policy Standards; b) Resources; c) Relations between Organizations; d) Characteristics of the implementing agent; e) Economic, social and political environmental conditions; f) the disposition of the executor. The results of the study show that policy standards and objectives have not felt a significant impact from existing regulations. Then human resources, budget, and materials at the Tasikmalaya City Manpower Office have not run optimally. Relations between organizations have gone quite well. The characteristics of the implementer have not been properly implemented, especially to the labor union. The disposition of the implementer has carried out programs that have referred to the needs of wages in the lake city, but there needs to be realistic and preventive measures taken in an effort to socialize wages and employment. Likewise, economic, social and political conditions that are quite supportive of the implementation of wages where the lake area itself has supporting human resources and natural resources.

*Keywords : Policy Implementation, City Minimum Wage, Tasikmalaya City
References : 34 References (2003-2024), 6 Books, 16 Journals, Documents 4
and 8 Internet Sources*